

---

**GERAKAN EKONOMI PESANTREN**  
**(Studi atas Pesantren Sidogiri Pasuruan )**

**Moh. Nadir**

nadir@walisogo.ac.id  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Negeri Semarang

**Abstrak**

Pesantren pada umumnya merupakan lembaga pendidikan tradisional yang masih mempertahankan nilai-nilai salafiyahnya, namun demikian pesantren selalu dinamis, karena pesantren dalam gambaran total, memperlihatkan dirinya seperti sebuah parameter, suatu faktor yang secara tebal mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas, baik di pedesaan maupun perkotaan di negara kita Indonesia ini. Karena pesantren bagian integral masyarakat, mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Pesantren Sidogiri yang merupakan bagian integral dari masyarakat, cukup interest untuk memberikan solusi persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, seperti ekonomi.

***Kata kunci;** Pesantren, ekonomi, Pemberdayaan*

**Abstract**

Pesantren is generally a traditional educational institution that still retains the values salafiyahnya , however, boarding is always dynamic, because boarding schools in the total picture, revealing himself as a parameter, a factor that characterizes the lives thicker wider community , both in rural and urban areas in our country Indonesia. Because boarding an integral part of society , have a responsibility to develop and empower people in

all fields, whether social, cultural, and economic. Pesantren Sidogiri which is an integral part of the community, enough interest to provide solutions problems that exist in the middle masyarakat, such as economics .

***Keywords;** boarding school , economic , and empowerment*

## Pendahuluan

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang merupakan wujud proses perkembangan sistem pendidikan nasional, dari segi historis tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigeneous*). Sebab, lembaga yang serupa dengan pesantren sebenarnya sudah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Budha. Sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada,<sup>1</sup> sedangkan Mastuhu memberikan pengertian pesantren adalah salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu Agama Islam, dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup sehari-hari (*tafaquh fiddin*), dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Zamakhsari Dofier yang mengambil dari karya-karya sastra Jawa klasik seperti *Serat Cebolek*, *Serat Centini* dan lain-lain, menjelaskan paling tidak sejak abad ke 16 telah banyak pesantren-pesantren yang masyhur menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren-pesantren ini mengajarkan berbagai kitab klasik dalam bidang jurisprudensi, teologi

---

<sup>1</sup> Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina, 1997, hlm 3

<sup>2</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS, 1994, hlm 3

dan tasawuf.<sup>3</sup> Sependapat dengan Zamakhsari, Mastuhu menegaskan, pesantren telah ada dan mulai dikenal sejak periode 13 masehi.<sup>4</sup> Fenomena kesejarahan pesantren telah memunculkan pandangan yang beragam tentang asal usulnya. Meski demikian, harus diakui bahwa babakan sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pesantren. Bahkan peran dan kontribusinya makin kentara di banding dengan komponen bangsa lainnya ketika mampu mengelola warisan tradisi *salafiah* dan budaya lokal.<sup>5</sup>

Walaupun pesantren masih mempertahankan nilai-nilai *salafiyahnya*, dalam pandangan Dawam Raharjo pesantren selalu dinamis, karena pesantren dalam gambaran total, memperlihatkan dirinya seperti sebuah parameter, suatu faktor yang secara tebal mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas, tetapi dirinya tak kunjung berubah dan bagaikan tak tersentuh dinamika perkembangan masyarakat sekelilingnya setidak-tidaknya jika orang membayangkan perubahan pada dirinya, maka perubahan itu hanya dapat difahami dalam sekala panjang.<sup>6</sup> Sudah tentu tidak ada sesuatu gejala sosial di dunia ini yang selalu tetap dan tidak berubah, begitu pula halnya dengan pesantren.

---

<sup>3</sup> Dhofi er, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES 1982, hlm 34

<sup>4</sup> Mastuhu, *Op. cit.*, 1994, hlm 3

<sup>5</sup> Haidari, Amin, dkk., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, IRD Press, Jakarta, 2004, hlm 6

<sup>6</sup> Dawam Raharjo, 1974, "Pesantren dan Pembaharuan", Jakarta: LP3ES, hlm 1

Melihat gambaran pesantren di atas, sebagaimana yang disampaikan para pakar menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga yang masih mempertahankan tradisi *salafiyah*nya, namun demikian secara empirik pesantren sebagai lembaga tradisional telah mampu menunjukkan eksistensinya dalam berbagai situasi, bahkan mampu mengambil peran dan fungsi dalam perubahan sosial kemasyarakatan, seperti *agent of social change* dan *cultural broker*, sebagai penyaring arus informasi yang masuk ke masyarakat, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak<sup>7</sup>. Di samping itu pesantren dengan caranya sendiri telah mampu berperan sebagai pelopor perubahan itu sendiri, bukan sekedar melakukan penyaringan informasi.

Pesantren sebagai bagian integral masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Sahal Mahfuzd, mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Dan menurutnya ini merupakan tugas baru bagi pesantren yang sementara ini berkutat dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan. Walaupun sifatnya masih sporadis, kurang terkoordinasi, tidak

---

<sup>7</sup> Geertz, Clifford, "The Javanese Kiyayi: The Changing Role of Cultural Broker", tt., hlm 50

institusional dan belum disertai dengan visi dan misi yang jelas, serta perangkat pendukungnya.<sup>8</sup>

Seorang ilmuwan sosial Jerman yang pernah meneliti pesantren di Indonesia, Manfred Ziemek mengatakan bahwa pesantren bersama-sama muridnya atau dengan kelompoknya yang akrab mencoba melaksanakan gaya hidup yang menghubungkan kerja dan pendidikan serta membina lingkungan desa berdasarkan struktur budaya dan sosial. Karena itu pesantren mampu menyesuaikan diri dengan bentuk masyarakat yang beraneka ragam. Akhirnya pesantrenlah yang hampir semata-mata merupakan basis terbuka bagi penduduk desa demi terlaksananya swadaya dalam bidang sosial, budaya dan perekonomian.

Dalam kaitan gagasan itulah pesantren diharapkan tidak lagi sekedar memainkan fungsi tradisionalnya yaitu; “tranmissi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, reproduksi ulama”, tetapi juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup; dan lebih penting lagi menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya. Dalam konteks terakhir, terlihat semakin banyak pesantren yang terlibat dalam aktivitas vocational dan ekonomi, seperti dalam usaha-usaha agribisnis

---

<sup>8</sup> Mahfudh, Sahal, *Pesantren Mencari Makna*, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 1999, hlm 1-2

yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan; pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan dan koperasi.<sup>9</sup>

Pondok Pesantren Sidogiri, selanjutnya disebut PPS, merupakan salah satu pesantren yang cukup peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar termasuk dalam bidang ekonomi. Ini berbeda dengan kebanyakan pesantren yang kurang tertarik dengan persoalan-persoalan ekonomi dan masih menekankan pada persoalan agama saja. Selain tertarik dengan bidang ekonomi pesantren Sidogiri masih menjaga tradisi pesantren salafiyah yang mengajarkan kitab-kitab kuning sebagaimana pesantren lainnya.

### **Sejarah Pesantren Sidogiri**

Sesuai dengan dokumentasi dan informasi dari sekretaris umum dan informan yang lain, bahwa cikal-bakal sejarah Pondok Pesantren Sidogiri didirikan oleh Sayid Sulaiman. Pada awalnya, beliau hanya mengajar seorang santri yang berasal dari Banyuwangi yang selanjutnya menjadi murid satu-satunya Sayid Sulaiman. Dengan santrinya yang berasal dari Banyuwangi tersebut, Sayid Sulaiman membangun sebuah surau yang amat sederhana sebagai tempat mengaji, tepatnya pada tanggal 17 September 1745 M., dan tanggal tersebut yang dicatat oleh

---

<sup>9</sup> Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama*, Bandung, Mizan, 1994, hlm xxi-ii

pengurus Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) sebagai tanggal berdirinya pondok Pesantren Sidogiri. Sedangkan berdasarkan dokumen yang ditandatangani oleh Kiai A. Sa'dullah Nawawi pada tahun 1971, menyatakan bahwa pada tahun tersebut, PPS berusia 226 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PPS berdiri tahun 1745 (wawancara, HM. Masykuri Abdurrahman, Sekretaris Pondok).

Kemudian karena suatu tugas, konon karena dipanggil ibunya di Jombang, Sayid Sulaiman meninggalkan Sidogiri kemudian wafat dalam perjalanan pulang, dan dimakamkan di Desa Mojo Agung Jombang. Sepeninggal Sayid Sulaiman, PPS mengalami kekosongan

kepemimpinan, sehingga, kemudian menantunyanya Kiai Aminullah meneruskan membina PPS. Di bawah kepemimpinannya, PPS semakin berkembang dan semakin meningkat jumlah santrinya. Namun belum lama memimpin PPS, Kiai Aminullah wafat dan dimakamkan di makam PPS.

Setelah Kyai Aminullah, ada perbedaan catatan sejarah. Menurut Alwi, kepemimpinan PPS dilanjutkan menantunyanya, yaitu Kiai Mahalli, kemudian diteruskan menantunyanya, Kiai Nur Hasan. Namun menurut suplemen "memorial" majalah organisasi murid intra sekolah (OMIM) Aliyah Tarbiyatul Mu'alimin (AYM) "ijtihad" (edisi 16/!. 9/R. Awal 1423), sepeninggal Kiai Aminullah, PPS dipimpin oleh Kiai Abu

Dzarrin, Kiai Utsman, Kiai Husain, Kiai Nur Hasan, Kiai Bahar, Kiai Nawawi, kemudian Kiai Abd. Jalil bin Abd. Syakur.

Hal demikian, ketika penulis konfirmasikan, diakui memang ada beberapa “sejarah yang hilang” setelah Kiai Aminullah sampai dengan Kiai Nur Hasan yang mencoba dipecahkan oleh murid Aliyah Tarbiyatul Mu’alimin (AYM), melalui suplemen majalah “Ijtihad”. Namun diketahui, Kiai Nur Hasan mempunyai tiga orang anak, yaitu Kiai Bahar, Kiai Nawawi, dan Kiai Dahlan. Semua anaknya tinggal di Sidogiri, kecuali Kiai Dahlan.

Pasca Kiai Nur Hasan, atas petunjuk guru dari putra-putra Kiai Nur Hasan (syaikhona kiai Kholil Bangkalan), ditetapkan Kiai Bahar Nur Hasan sebagai pengasuh PPS. Menurut beberapa riwayat dari para sesepuh, Kiai Bahar mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya dalam kedalaman ilmunya. Diyakini, Kiai Bahar Nur Hasan memiliki ilmu *wahbi/laduni*, sehingga beliau menjadi pengasuh di PPS sejak umur 12 tahun. Sedangkan saudaranya, Kiai Dahlan Nur Hasan mendirikan pesantren, sekaligus menjadi pengasuh di desa Sukunsari, Kebonagung, Pasuruan (kurang lebih 9 km dari Ponpen Sidogiri).

Setelah Kiai Bahar Nur Hasan wafat, PPS dipimpin oleh KH. Nawawi. Di tangan Kiai Nawawi, PPs Sidogiri mulai mempunyai reputasi nasional. Kiai Nawawi adalah termasuk pengagas pendirian NU generasi pertama, bersama KH.

Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah. Sejak itu, PPS diperhitungkan dalam kancah kehidupan keberagaman nasional. Bahkan KH. Hasyim Asy'ari sendiri sering melakukan diskusi tentang permasalahan agama dengan Kiai Nawawi.

Kiai Nawawi wafat pada tahun 1927 M, meninggalkan 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dari 3 orang istri. Karena ke 5 anak laki-lakinya belum dewasa maka kepemimpinan PPS diteruskan oleh menantu beliau, KH. Abdul Jalil bin Abd. Syakur, suami Nyai Hj. Hanifah (w.1947) dan dibantu oleh KH. Abdul Adzim, suami Nyai Fatimah.

Pada masa penjajahan, di mana pesantren terlibat aktif dalam revolusi fisik –termasuk Pondok Pesantren Sidogiri (PPS)-, pasca *resolusi jihad* yang dikeluarkan NU, menjadikan dua pengasuh PPS tersebut saling bahu membahu membuat perlawanan dan pertahanan terhadap serangan penjajah Belanda. KH. Abdul Adzim sering ditangkap dan disekap Belanda. Kiai Abdul Jalil wafat pada tanggal 26 September 1947. Setelah Kiai Jalil, kepemimpinan PPS dilanjutkan oleh putra Kiai Nawawi, yaitu Kiai Kholil Nawawi, setelah para kiai sepuh melakukan musyawarah yang alot membahas pengganti Kiai Jalil. Semua putra, karena *ketawadhu'*annya saling mempersilahkan yang lain untuk menjadi pengasuh. Pada masa ini PPS sempat mengalami kevakuman kepemimpinan formal hampir dua tahun (1947-1949). Walaupun demikian, secara praktek semua putra Kiai Nawawi memberi pengajian kitab di biliknya masing-masing.

Melihat kenyataan ini muncul keprihatinan dari salah seorang alumni, yaitu KH. Biroel Alim, yang kemudian mengumpulkan semua alumni, khususnya di daerah Pasuruan. Melalui pertemuan alumni, secara aklamasi para alumni memohon kepada KH Kholil Nawawi untuk menjadi pengasuh PPS. Karena terpanggil amanat, akhirnya beliau bersedia menjadi pengasuh PPS (Ijtihad, edisi 16/!9/R. Awal 1432 H).

Dalam perjalanan memimpin PPS, Kiai Kholil Nawawi tidak menempatkan diri sebagai pemimpin tunggal, apalagi saat itu PPS juga mempunyai kader yang mempunyai pengalaman organisasi, yaitu Kiai A. Sa'dullah Nawawi yang pernah menjadi tentara pada masa perjuangan mengusir penjajah sampai dengan pangkat letnan. Pada waktu itu, KH. Kholil Nawawi sudah mencanangkan pembagian peran dengan Kiai A Sa'dullah. Secara formal kepemimpinan dipegang Kiai Kholil Nawawi, sedangkan yang menjalankan kepengurusan pondok diserahkan pada Kiai Sa'dullah Nawawi sebagai ketua umum.

Kiai A. Sa'dullah Nawawi yang pernah menjadi tentara pada masa perjuangan mengusir penjajah sampai dengan pangkat letnan. Pada waktu itu, KH. Kholil Nawawi sudah mencanangkan pembagian peran dengan Kiai A Sa'dullah. Secara formal kepemimpinan dipegang Kiai Kholil Nawawi, sedangkan yang menjalankan kepengurusan pondok diserahkan pada Kiai Sa'dullah Nawawi sebagai ketua umum.

Pada masa ini, Kiai A. Sa'dullah dengan dukungan penuh Kiai Kholil telah mengenalkan penataan manajemen dan administrasi PPS. Pada sekitar tahun 1960-an Kiai Sa'dullah mempunyai gagasan untuk membentuk suatu badan musyawarah, sehingga perjalanan PPS menjadi pemikiran bersama antara 5 putra Kiai Nawawi dengan nama "Panca Warga", yaitu Kiai Nur Hasan (w.1967), Kiai Kholil (w.1978), Kiai Siradj (w.1988), Kiai A. Sa'dullah (w.1972) dan Kiai Hasan (w.2001). Ide ini direspon positif oleh semua putra Kiai Nawawi, dengan menetapkan ketua Panca Warga, yaitu KH. Kholil sebagai pengasuh.

Pada tahun 1967 (Wawancara, Ustadz Baihaqi, 21 Juni 2007) KH Nur Hasan anggota Panca Warga tertua wafat, lima tahun berikutnya 1972 Kiai A Sa'dullah, penggagas Panca Warga sekaligus ketua umum PPS juga wafat. Pada saat itu PPS kesulitan menemukan kader yang siap menjadi pengasuh seperti Kiai Sa'dullah. Sehingga pernah terjadi PPS mengangkat Kiai Zakki Ubed, tokoh yang menjadi anggota DPR/ MPR menjadi ketua umum PPS walaupun dia bukan kader PPS.

Pada tahun 1978 anggota Panca Warga tinggal menjadi dua orang yaitu KH.Siradj dan KH. Hasani, Kiai Hasani yang diharapkan menjadi pengasuh, tapi karena ketawadhu'annya tidak bersedia, sedangkan Kiai Siradj saat itu aktif di organisasi NU dan menjadi DPRD. Maka pada saat itu PPS kembali mengalami kevakuman kepemimpinan sampai pada tahun 1983.

Melihat hal itu Kiai Siradj mempunyai gagasan untuk meneruskan Panca Warga dengan membentuk majelis musyawarah keluarga yang anggotanya para cucu laki-laki dari Kiai Nawawi.

Pada saat itu majelis keluarga dipimpin oleh KH. Abdul Alim bin Abdul Jalil, yang sekaligus sebagai pengasuh PPS, dan ketua umum PPS dipercayakan kepada Mas Badruddin !oyyib. Anggota majelis keluarga adalah sebagai berikut; 1. KH. Abdul Alim bin Abdul Jalil (ketua), 2. KH Nawawi Abdul Jalil (sekretaris), 3. H. A. Fu'ad Nur Hasan (anggota), 4. Mas Abdullah Saukat (anggota), 5. Mas Nawawi Sa'dullah (anggota), 6. KH Abdul Karim !oyyib (anggota), 7. H. Badruddin !oyyib (anggota).

### **Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi**

Fungsi utama pesantren adalah, pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (center of excellence). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (human resource). Ketiga, sebagai lembaga yang melakukan pemberdayaan pada masyarakat (agent of development). Dan fokus yang perlu menjadi bahan kajian di sini adalah fungsi ketiga dari pesantren tersebut.

Sebagai sebuah institusi sosial, Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) memiliki banyak kekuatan. Pertama, kiai adalah figur yang hingga saat ini memiliki kemampuan sebagai pemimpin

informal. Pada masyarakat yang memang masih paternalistik ini, pemimpin informal masih sangat dihargai oleh masyarakat. Dalam konteks ekonomi, kiai yang memimpin pesantren itu sejatinya adalah orang yang telah mandiri secara ekonomi seperti menjadi seorang petani, pedagang. Ini berarti sejak awal kiai-ulama telah mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh, tidak hanya dari aspek mental, tetapi juga sosial dan ekonomi. Jiwa dan semangat entrepreneurship inilah yang mendasari kemandirian perekonomian pesantren PPS Sidogiri.

Kedua, PPS Sidogiri memiliki akses dengan lembaga-lembaga di luarnya, baik institusi pemerintah ataupun institusi lainnya. Bahkan juga memiliki relasi-relasi dengan individu yang memiliki kemampuan dalam ekonomi maupun manajerial pengembangan ekonomi. Ketiga, PPS Sidogiri memiliki konsumen langsung, yakni santri, para alumni dan masyarakat sekitar. Keempat, PPS Sidogiri memiliki pengembangan-pengembangan ke depan, baik secara kelembagaan agamanya maupun lainnya.

Kekuatan PPS sebagai institusi sosial ini, tentu dapat dimanfaatkan PPS Sidogiri untuk menjadi sebuah lembaga ekonomi umat. Dalam konteks inilah PPS bisa menjadi media pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Harus disadari, bahwa setelah kegagalan sistem ekonomi konglomerasi, maka harapan itu ditumpahkan ke lembaga-lembaga rakyat yang sudah teruji dan lulus dalam sejarah

kehidupan masyarakat dan berbangsa. Ternyata, yang justru tahan di tengah badai krisis ekonomi adalah lembaga-lembaga ekonomi mikro yang berbasis rakyat. Industri kelas menengah dan kecil seperti home industry justru memiliki daya kekuatan ketika berhadapan dengan krisis multidimensional ini.

Dalam kehidupannya, PPS Sidogiri memiliki beberapa model pengembangan networking. Yang biasa terlihat dalam kehidupan keseharian masyarakat ada enam model pembangunan networking yang cukup memberikan keleluasaan bagi PPS Sidogiri dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Beberapa networking tersebut antara lain, networking model pemberdayaan masyarakat luar pesantren, networking model kemitraan pesantren dengan dunia usaha, networking model korporasi, networking model kemitraan antar pesantren, networking model kemitraan dengan pemerintah dan networking model kemitraan dengan LSM.

Apabila dilihat dari pelbagai model networking di atas, maka PPS Sidogiri tengah berupaya untuk membangun networking dengan model pemberdayaan masyarakat. Dengan model ini PPS Sidogiri menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja pesantren. Pesantren biasanya tidak menarik keuntungan dari kegiatan masyarakat, tetapi lebih memposisikan diri sebagai motivator bagi masyarakat. Model ini, meski seolah kehilangan pendapatan tetapi PPS Sidogiri mendapatkan keuntungan, yaitu

---

berupa tumbuhnya rasa memiliki pesantren oleh masyarakat.<sup>10</sup> Keamanan pesantrenpun menjadi terjamin. Di samping itu, PPS Sidogiri menjadi mudah ketika meminta elemen masyarakat untuk membantu pesantren. Dengan model inilah sebenarnya akar dan pohon untuk melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren makin kuat dan bisa tumbuh subur.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, PPS Sidogiri setidaknya memiliki tiga motif. *Pertama*, motif keagamaan, karena kemiskinan bertentangan dengan etika sosial ekonomi Islam. *Kedua*, motif sosial, karena kiai juga seorang pemimpin yang harus mengatasi krisis ekonomi setempat. *Ketiga*, motif politik, karena pemegang kekuasaan mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi pada tingkat mikro dan makro (Penasehat Kapontren PPS Sidogiri, H.Mahmud Ali Zein sekarang ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah [DPD] dari Jatim periode 2004-2009).

Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) yang dalam fungsinya melayani masyarakat, dapat pula dilihat dari upayanya dalam melayani kebutuhan untuk menanggapi persoalan-persoalan kemiskinan, memberantas kebodohan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sebagainya. Di sinilah bisa ditunjukkan betapa pentingnya kehadiran PPS Sidogiri yang tidak hanya mengutamakan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan

---

<sup>10</sup> Chirzin, Muhammad, *Modul Pengembangan Pesantren Untuk Pengasuh Pesantren*, Yogyakarta: Puskadiabuma, 2006, hlm 219

masyarakat sekitar lebih mendapat tempat dalam kerangka usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lahir maupun batin. Hal ini penting untuk dipahami karena pesantren secara historis didirikan dari dan untuk masyarakat, dengan tujuan mengadakan transformasi sosial bagi (masyarakat) daerah sekitarnya. Ia hadir mengabdikan dirinya mengembangkan dakwah Islam dalam pengertian luas, mengembangkan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan pada gilirannya didukung secara penuh oleh mereka.

Aspek lain signifikansi pelibatan PPS Sidogiri dalam pemberdayaan masyarakat berpeluang pada kenyataan bahwa masyarakat Sido-giri yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya di daerah pedesaan. Pada sisi itu, PPS Sidogiri yang berkembang dan tersebar di daerah-daerah pedesaan, sampai level tertentu, merupakan representasi dari masyarakat muslim daerah-daerah pedesaan.

Selain itu, bisa ditambahkan di sini bahwa pondok pesantren Sidogiri (PPS) bisa disebut sebagai pesantren yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, karena telah memenuhi unsur sebagai berikut: (a) kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah, (b) pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri, dalam hal ini oleh pesanteren sidogiri sendiri, (c) karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang berdaya, maka upaya pemberdayaan masyarakat

menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (*cooperatif*) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal, (d) menggerakkan partisipasi masyarakat untuk saling membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Konsep ini, tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat.<sup>11</sup>

### **Gerakan Ekonomi di Pesantren Sidogiri**

Semangat ekonomi dan kemandirian berwirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi di Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) Pasuruan sudah lama dilakukan oleh para sesepuh pesantren tersebut. Dorongan dan keinginan yang kuat untuk mandiri di bidang ekonomi di PPS dimulai oleh KA. Sa'doellah Nawawie yang pada tahun 1961 merintis berdirinya koperasai pondok pesantren sebagai wadah belajar mandiri, wirausaha dan pengabdian santri. Pada waktu itu laboratorium prakteknya barulah berupa kedai dan toko kelontong, dan praktik yang diselenggarakan masih sederhana. PPS membuka kedai untuk

---

<sup>11</sup> Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997, hlm 4

menyediakan nasi dan makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan santri sendiri.

Motto koperasi yang sering disampaikan oleh KA. Sa'doellah Nawawie adalah "*dari santri oleh santri dan untuk santri*", maksudnya adalah Kopontren Sidogiri dibentuk modalnya dikumpulkan dari para santri. Modal tersebut kemudian dikelola melalui usaha perdagangan oleh para santri yang menjadi pengurus Kopontren. Keuntungan atau laba usaha yang dilakukan oleh kopontren nantinya akan dikembalikan kepada santri.

Pada masa kepemimpinan PPS dipegang Kyai Kholil Nawawie, ia memberikan wewenang penuh kepada pengurus koperasi untuk menjalankan roda usaha. Karena itu, ketika ada seorang kyai dari Rembang Jawa Tengah menemui Kyai Kholil untuk menawarkan buku-buku, maka beliau memanggil salah seorang pengurus Kopontren. Kemudian ia menyampaikan pada tamunya bahwa untuk urusan yang berkaitan dengan masalah koperasi maka dipersilahkan untuk berhubungan dengan pengurus koperasi. Kyai Kholil memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus untuk menjalankan tugasnya (wawancara, M. Asykuri Darusman, 22 Juni 2007).

Sekalipun kegiatan usaha Kopontren Sidogiri sudah dimulai sejak 1961, namun secara resmi baru mengajukan permohonan Badan Hukum Koperasi pada April 1997. Pada 15 Juli 1997 terbitlah Akta Badan Hukum Kopontren Sidogiri nomor :

441/BH/KWK.13/VII/97. Seiring dengan terbitnya badan hukum, kopontren Sidogiri terus berbenah menata manajemen dan kinerja usahanya dengan mengikut sertakan pengurus dan manajer pada berbagai kegiatan pelatihan dan workshop manajemen koperasi. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, di antaranya dengan STIE Kucecwara Malang dan Fakultas Ekonomi UNISMA Malang.

Berkat keuletan dan kehematan pengurus, laba yang diperoleh dari membuka kedai kemudian dikembangkan dengan usaha lain; mendirikan toko kelontong yang menjual sembako dan kebutuhan rumah tangga. Semula hanya terbatas bagi lingkungan pesantren, namun kemudian mendirikan toko buku, toko bangunan di sejumlah pasar di Pasuruan. Kini usaha yang dijalankan oleh Kopontren Sidogiri sangat beragam yaitu; kantin, toko kelontong (menjual sembako), toko buku, toko alat rumah tangga, kosmetik, toko bangunan, mini market, wartel, pertanian, pembuatan sarung dan baju muslim. Selain itu masih ada usaha percetakan kitab, buku tulis dan undangan. Sejak 31 Desember 2003 kopontren telah berkembang menjadi 10 unit pelayanan, 3 unit di antaranya dibuka khusus untuk melayani masyarakat umum. Kesepuluh unit tersebut adalah Unit 01 – Toko Buku, Busana dan Kitab (di dalam PPS), Unit 02 – Kedai makanan dan minuman (di dalam PPS), Unit 03 – Toko Kelontong (di luar PPS – Sidogiri), Unit 04 – Kedai makanan dan minuman (di dalam PPS), Unit 05 – Percetakan (di luar PPS

---

– Sidogiri), Unit 06 – Pertanian dan Peternakan, Unit 07 – Toko Kelontong (di luar PPS – Gembyang), Unit 08 – Wartel dan Poserba (di luar PPS – Sidogiri), Unit 09 – Toko Kelontong (di luar PPS – Rembang), Unit 10 – Grosir atau Pusat Perkulakan yang berada di luar PPS – Sidogiri (Ustadz Zumairi Nor, 2012).

Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini, kopontren menjalin kerjasama dengan PT Bromo Tirta Lestari, sebuah perusahaan air minum di kawasan Probolinggo, dalam memproduksi air minum kemasan merek “santri”. Semula air minum dalam kemasan yang diproduksi hanya dua ukuran yaitu ukuran gelas (250 ml) dan ukuran botol sedang (600 ml). Sejak pertengahan Januari 2004 kopontren Sidogiri mulai memasarkan produk baru ukuran botol besar (1500 ml). Setiap bulannya kopontren Sidogiri memasarkan sekitar 16000 dos “santri” dengan menggunakan jaringan distribusi dan pemasaran mulai dari Bali, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya dan Madura (Republika, 2003). Selain usaha di atas PPS-Sidogiri juga mendirikan usaha keuangan berbasis syari’ah yang mendorong ekonomi masyarakat.

#### 1. BMT MMU

Keberadaan Kopontren Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) di kemudian hari menjadi cikal bakal kebangkitan ekonomi syari’ah di PPS. Karena dari kopontren itulah *ghiroh* kemandirian ekonomi di Pesantren Sidogiri tersemai. Sehingga setelah berhasil mengembangkan Kopontren

mereka tidak puas diri, tepatnya pada pertengahan 1997 pengurus kopontren dan beberapa orang guru Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Pondok Pesantren memprakarsai berdirinya koperasi serba usaha yang fokus usahanya adalah simpan pinjam pola syari'ah (SPS) dengan nama *Baitul Mal wa al-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah* (BMT MMU). Mereka mendirikan koperasi BMT-MMU karena resah dan prihatin dengan kondisi masyarakat yang mulai terjerat dengan praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentenir yang sudah merambah sampai ke desa-desa di sekitar Sidogiri.

Pendirian BMT MMU dilatar belakangi perilaku ekonomi masyarakat di sekitar pesantren yang cenderung *ribawi* dan terjerat rentenir, pesantren melalui para guru madrasah dan pengurus Madrasah Miftahul Ulum (MMU) merasa terpanggil untuk merubah perilaku masyarakat yang sudah keluar dari nilai keislaman. Masyarakat desa Sidogiri yang mayoritas pedagang kecil di pasar dan di sekitar pesantren terjerat para rentenir, hidupnya dalam kekurangan, sekitar 80% penduduk sekitar tidak bekerja, walaupun dapat pekerjaan hasilnya kurang menyejahterakan. Melihat hal itu PPS Sidogiri merasa terpanggil untuk membantu masyarakat, sehingga PPS Sidogiri mencari terobosan untuk mengatasi problem yang dihadapi mereka.

Usaha untuk mengurangi perilaku ribawi sudah dimulai sejak tahun 1983, para ustadz PPS Sidogiri yang prihatin dengan fakta tersebut, melakukan iuran untuk meminjami para pedagang

di sekeliling pondok agar tidak terjerat para rentenir. Namun usaha para ustadz tersebut gagal untuk mengentaskan masyarakat dari rentenir. Hal ini dikarenakan mental rentenir sudah mendarah-daging di para pedagang itu, bahkan akhirnya uang yang dipinjamkan kepada masyarakat itu tidak dikembalikan karena habis (Ustadz Ahmad Baihaqi, 21 Juni 20012).

Baru pada tahun 1997 para ustadz setelah mendapat dukungan dari pengasuh PPS, mendirikan koperasi dan *Baitul Mal wa Tanwil* (BMT) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terjerat para rentener, dengan mendirikan koperasi BMT-MMU. Awalnya bermodalkan semangat dan inspirasi dari buku panduan dan petunjuk pada seminar Simpan Pinjam Syari'ah di Probolinggo serta Pendidikan Perbankan Syari'ah di Batu Malang, berdirilah BMT-MMU pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H atau 17 Juli 1997 dengan modal 13,5 juta (Ustadz Mahmud Ali Zein, 20 Juni 2012). Para guru dan pengurus MMU Ponpes Sidogiri yang mengetahui bahaya ekonomi ribawi terus berfikir dan berdiskusi untuk mencari gagasan yang bisa menjawab permasalahan ummat tersebut. Akhirnya ditemukanlah gagasan untuk mendirikan usaha bersama yang mengarah pada pendirian lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) untuk mengangkat dan menolong masyarakat bawah dari jeratan ekonomi ribawi dan mengangkat

martabat ekonominya yang masih dalam kelompok mikro / kecil.

Akhirnya mereka menyetujui untuk membentuk tim kecil yang diketahui oleh H. Mahmud Ali Zein untuk menggodok persiapan berdirinya koperasi, baik yang terkait dengan keanggotaan, permodalan, legalitas dan system operasionalnya. Tim berkonsultasi dengan pejabat kantor Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK&M) Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan koperasi. Di samping itu, tim kecil juga mendapatkan tambahan informasi tentang BMT dari pengurus PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) pusat.

Maksud dan tujuan dari Koperasi BMT MMU Sidogiri (1) Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, (2) Koperasi ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta diridloi Allah SWT.

Usaha-usaha yang diwadahi di dalam Koperasi BMT-MMU Sidogiri meliputi: (1) Simpan pinjam pola Syari'ah, (2) Industri rumah tangga (*home industry*) produksi roti di desa Jeruk, (3) Toko dan perdagangan umum, (4) Sektor jasa penggilingan padi di desa Jetis, (5) Usaha yang mendapat prioritas adalah usaha

BMT, karena manfaatnya sangat dirasakan oleh anggota dan masyarakat umum.

Pada usaha simpan pinjam, BMT-MMU memberikan pinjaman kepada masyarakat di sekitar pesantren dan masyarakat desa Sidogiri dengan memberikan persyaratan yang sangat mudah dan tidak memberatkan. Untuk meminjam ke BMT MMU para nasabah di minta mengajukan surat permohonan kepada BMT dengan melampirkan foto copy KTP, dan kartu keluarga (KK) yang berkantor di Kantor pst: Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan 67151 Provinsi Jawa Timur Telpon (0343) 423521 Fax. (0343) 423571E-mail. [bmt\\_ugt@sidogiri.net](mailto:bmt_ugt@sidogiri.net). Dan kemudian diproses oleh petugas (receptionis) BMT, dan jika pinjaman yang diajukan di bawah lima ratus ribu rupiah, maka BMT membebaskan agunan.

BMT melayani nasabah mulai jam 6 (enam) pagi sampai jam 11 (sebelas) siang, hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus BMT adalah para ustadz di Madrasah Miftahul Ullum-Pondok Pesantren Sidogiri. Mereka setelah jam 11 siang melaksanakan peran dan tugas pokoknya mengajar di madrasah. Namun karena adanya keinginan dari masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat, maka sekarang jam bukanya di tambah sampai jam 15.00 sore (wawancara Ustad Zumairi 2012). Ada beberapa hal yang menarik dan membedakan BMT MMU ini dengan BMT lainnya adalah para pegawai dan pelayannya semuanya laki-laki serta

menggunakan pakaian ala santri (memakai sarung, baju lengan panjang dan kopiah). Walaupun demikian mereka dengan ramah dan cekatan serta profesional melayani para tamu yang datang ke BMT MMU.

Dalam melakukan pembiasaan budaya serta gerakan ekonomi terhadap masyarakat sekitar pesantren dan para penduduk Sidogiri yang kebanyakan pedagang-pedagang kecil, BMT- MMU memberikan kemudahan pinjaman modal, tidak memakai sistem ribawi (bunga). Yaitu dengan cara mereka diberikan kebebasan oleh BMT untuk mengembalikan modalnya saja, dan jika mereka mempunyai kelebihan maka tidak ada ketentuan jumlah yang harus diberikan kepada BMT. Hal ini membuat para peminjam merasa ditolong oleh BMT dan sebagai bentuk ungkapan terimakasihnya mereka biasanya memberikan yang lebih besar kepada BMT MMU (Ustadz Dhumairi Nor, 22 Juni 2012)

Selain memberikan pinjaman BMT juga membangun kios-kios di sekitar pesantren dan lapangan sepak bola untuk berjualan, yang pembiayaannya semuanya ditanggung oleh BMT. Kios-kios tersebut ditawarkan kepada penduduk sekitar pesantren yang berminat untuk membeli dengan cara diangsur, serta dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu BMT juga meminjam modal kepada pembeli kios tersebut untuk dijadikan modal berdagang kepada mereka (Ustadz Dhumairi Nor, 22 Juni 2012)

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren lewat BMT juga melalui pendampingan pedagang, dengan cara memberikan solusi yang tepat bagaimana mengelola bisnis secara baik agar para pedagang tidak rugi. Seperti contoh, jika ada pedagang yang bankrut (*muflis*) akibat menjual buah (dikarenakan tidak pas jual buah), maka BMT memberikan solusi dengan memberikan dorongan (*motivasi*) untuk bangkit kembali berjualan, namun jika orang tersebut merasa kurang cocok dengan jualan buah, ia diberi alternatif untuk jualan yang lain. Dan jika dia telah cocok untuk berdagang maka BMT akan memberikan pinjaman sebagai bentuk modal dagang tersebut. Dengan cara tersebut banyak pedagang yang frustrasi dapat kembali bangkit, dan akhirnya mereka bisa terlepas dari beban ekonomi. (Ustadz Abdul Madjid Umar, 23 Juni 2012)

Kesuksesan dalam mengelola kopontren dan BMT- UGT tidak membuat puas PPS dalam mengembangkan bidang ekonomi. Walaupun tujuan pendirian Pesantren bukan untuk bisnis, namun dari kemajuan ekonomi semakin mengharumkan nama Pondok Pesantren Sidogiri. Walaupun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh PPS hanya 5% dari keseluruhan aktivitas pesantren, namun hal ini cukup menonjol. Hal ini dikarenakan, menurut sekretaris pesantren Sidogiri M. Asyuri Darusman (wawancara 22 Juni 2012) pengembangan bidang ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah secara serius sangat

jarang dilakukan oleh pondok pesantren salafy *hatta* pondok pesantren modern.

## 2. Koperasi UGT

Sadar bahwa Kopontren dan BMT-MMU tidak memadai untuk berkiprah pada level propinsi dan nasional, mereka memprakarsai berdirinya sebuah koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT). Koperasi ini mulai beroperasi pada 5 Robi'ul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000. Secara resmi mendapat badan hukum koperasi dari Dinas Koperasi PK dan M Pripinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Koperasi UGT ini didirikan oleh beberapa guru dan pimpinan madrasah filial Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Ponpes Sidogiri, alumni Ponpes Sidogiri dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas (UGT) Ponpes Sidogiri. Dalam jangka panjang UGT diharapkan bisa membuka beberapa unit pelayanan di kabupaten-kabupaten yang banyak ditempati oleh anggota koperasi UGT dengan BMT MMU.

Koperasi UGT mempunyai Visi dan Misi yang sama dengan Koperasi BMT-MMU: Visinya, *“Terbangun dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari’ah Islam, Terwujudnya budaya ta’awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi”*. Sedangkan Misinya; *Menerapkan dan*

*memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi, Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah di bidang ekonomi adalah ADIL, MUDAH dan MASLAHAH, Meningkatkan kesejahteraan Umat dan anggota, Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/ Profesional).*

Koperasi UGT merupakan Lembaga keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) kedua yang berlatar belakang Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri. Apabila Koperasi BMT-MMU khusus beroperasi di Kabupaten Pasuruan, maka Koperasi UGT, sebagaimana izin yang didapatkan beroperasi di Kabupaten / kota se-Jawa Timur. Unit pelayanan pertama koperasi ini di Surabaya kemudian diikuti dengan pembukaan unit-unit lainnya seperti di Maesan Bondowoso, Jember, Bangkalan, Probolinggo, Besuki, Bawean dan Bantaran (Probolinggo), bahkan sampai Tanjuk Priok DKI Jakarta. Data yang penulis peroleh sampai April 2007 koperasi UGT sampai April 2007 telah mencapai 41 cabang dengan omzet sekitar 50,8 miliar rupiah.

Dan dalam perjalanannya, perkembangan koperasi UGT ini semakin baik dan cukup ekspansif dalam membaca peluang pasar, hal ini dapat dilihat dari ekspansi korporasi membuka kantor cabang di berbagai kawasan Indonesia, mereka tidak hanya konsentrasi di Jawa, namun juga mengembangkan usahanya sampai ke luar Jawa, yaitu Kalimantan dan Sumatera

dengan total omzet yang dimilikinya pada tahun 2012 lebih dari 4 triliyun, suatu nilai yang cukup fantastis bagi sebuah koperasi yang dikelola oleh Pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai *salaf*.

Pada awal berdirinya Koperasi UGT Sidogiri berobsesi membuka Unit pelayanan koperasi di setiap Kabupaten di Jawa Timur kemudian bisa berkembang ke wilayah-wilayah kecamatan yang banyak alumninya. Untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang diinginkan dalam pengembangan, BMT UGT bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya, yaitu : Koperasi MALABAR Pasrepan Pasuruan, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Untung Suropati Pasuruan, Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Surabaya, Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah Cabang Malang, Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Sidoarjo, Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Surabaya, Asuransi Syari'ah TAKAFUL Cabang Surabaya, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Malangucecwara Malang, UIN (Universitas Islam Negeri) Malang dan UNISMA (Universitas Islam Malang) Malang.

Selain membuka cabang, koperasi UGT juga mempunyai produk untuk sektor riil yaitu dalam bidang pertanian, usaha utama dari pertanian adalah : biosigi kompos aktif, biosigi kultur (semprot daun), biosigi pestisida (nabati), biosigi pestisida (anti tikus). Produk-produk tersebut bahan bakunya dibuat dari bahan non organik yaitu; air kencing sapi yang diolah selama kurang

lebih 1 minggu dan kemudian diberi enzim tertentu. Hasil panen tanaman yang diberi biosigi tersebut di atas menurut Abdul Majid Umar bisa meningkat dua kali lipat. Jika 1 hektar biasanya mendapatkan 7-8 ton maka jika diberi biosigi tersebut bisa meningkat menjadi 14-16 ton.

Dengan adanya hasil Nyata dari keberadaan ke-3 koperasi tersebut baik santri, para alumni hingga masyarakat sekitar merasakan dampak positif yang nyata bagi kehidupan perekonomian di lingkungannya. Santri dan wali santri tidak perlu lagi khawatir tentang kehalalan dan tingkat higienis dari makanan yang dikonsumsi, terciptanya peluang-peluang pasar baru untuk masyarakat sekitar koperasi, penyerapan tenaga kerja terutama para alumni di daerah-daerah, terciptanya perekonomian di pelosok-pelosok jaringan Pondok Pesantren Sidogiri, hilangnya praktik-praktik rentenir yang betul-betul tidak disukai oleh masyarakat, munculnya pedagang-pedagang baru di pasar karena adanya pinjaman yang tidak memberatkan, bertambahnya kepercayaan dari pihak ke-3 untuk menjalin kerjasama dengan PPS baik dari bank, lembaga non bank hingga para akademisi. Merasuknya sistem dan pola perdagangan, transaksi dan jual beli secara syar'i hampir keseluruhan lapisan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Sidogiri maupun jaringan diluarnya, menjadikan semangat warga PPS untuk terus berjuang dalam mewujudkan ekonomi syariah dengan selalu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem manajemen dan nilai-nilai organisasi.

## **Kesimpulan**

Pesantren sebagai salah satu lembaga tradisional yang bergerak dalam bidang pendidikan keagamaan dalam perkembangannya mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Pesantren sejak era perjuangan “sebelum kemerdekaan”, era kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru bahkan pada era reformasi sampai sekarang ini, berkontribusi besar terhadap bangsa ini. Baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya maupun ekonomi. Pesantren tidak perlu diragukan lagi keikutsertaannya andil mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Pada era perjuangan pesantren dan para santri juga terlibat langsung dalam merebut kemerdekaan negara ini dari tangan penjajah. Pada era global sekarang ini peran pesantren juga tidak berhenti melibatkan dirinya untuk kepentingan bangsa, bahkan perannya semakin penting dalam menjaga moral bangsa ini yang semakin tergerus oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai keislaman dan keindonesiaan, seperti free sex, hedonisme, materialisme, liberalisme, individualisme, yang semakin mendistorsi nilai-nilai lokal (*local wisdom*).

Dalam bidang muamalah yang di dalamnya termasuk urusan ekonomi juga tidak luput dari perhatian pesantren, Pesantren Sidogiri yang notabene pesantren salaf (tradisional) salah satu pesantren yang memelopori gerakan ini. Gerakan ekonomi yang dilakukan oleh pesantren ini cukup masif dan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar Sidogiri Pasuruan dan Jawa Timur pada umumnya. Dengan mendirikan berbagai unit usaha seperti koperasi pesantren, waralaba, lembaga keuangan syariah yang berupa BMT dan koperasi UGT pesantren sidogiri menjadi mandiri dalam persoalan finansial. Bahkan masyarakat sekitar juga terbantu dengan adanya gerakan ekonomi ini, karena mereka mendapatkan pinjaman secara syariah yang bebas dari akad ribawi yang memberatkan masyarakat kecil.

### Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama*, Bandung, Mizan, 1994.
- Chirzin, Muhammad, *Modul Pengembangan Pesantren Untuk Pengasuh Pesantren*, Yogyakarta: Puskadiabuma, 2006.
- Dawam Raharjo, "Pesantren dan Pembaharuan", Jakarta: LP3ES 1974.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES 1982,.
- Geertz, Clifford, "*e Javanese Kiyayi : "e Changing Role of Cultural Broker"*", tt.
- Haidari, Amin, dkk., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, IRD Press, Jakarta, 2004.
- Madjid, Nurcholis, *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta, Paramadina, 1997.
- Mahfudh, Sahal, *Pesantren Mencari Makna*, Pustaka Ciganjur, Jakarta, 1999.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS, 1994.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997.

## **WAWANCARA**

H. Mahmud Ali Zein (Pengawas dan Penaseha BMT –UGT Pasuruan), 20 Juni 2012

H. A. Baihaqi Zuhri (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri), 21 Juni 2012

H. Masykuri Abdurrahman (Sekretaris Umum PPS), 22 Juni 2012 HM.

Dumairi Nor (Direktur, BMT-MMU PPS) 22 Juni 2012 H.

Abdul Madjid Umar ( Direktu BMT-UGT) 23 Juni 2012

